

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG No. 7 TAHUN 2007 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN NAMORAMBE**

TESIS

OLEH

**NORMA SIAGIAN
NPM. 111801021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
No. 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Di Kecamatan Namorambe**

N a m a : Norma Siagian

N P M : 111801021

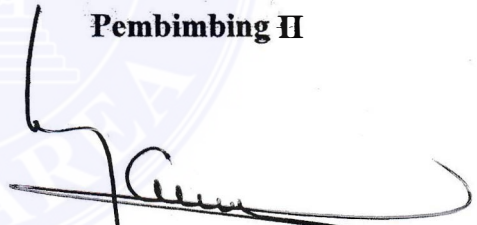
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II



Drs. Usman Tarigan, MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 17 Mei 2013

N a m a : Norma Siagian

N P M : 111801021



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Warjio, MA
Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS
Penguji Tamu : Prof. Dr. Subhilhar, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 17 Mei 2013

Yang menyatakan,




Norma Siagian

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Studi Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Nama : Norma Siagian
NPM : 111801021
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof.Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang paling hakiki di mana Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga desa, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitive, maka kepala desa mempunyai legitimasi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Namorambe Desa Namorambe, Desa Sudirejo, dan Desa Bekukul. Sampel diambil secara *purposive sampling* yaitu mereka yang secara langsung berkaitan dan terlibat dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, analisis data dilakukan dengan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di tiga Desa (Desa Bekukul , Desa Sudi Rejo dan Desa Namo Rambe) Kecamatan Namo Rambe secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dilihat dari *aspek komunikasi bahwa proses penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari aspek sumber daya telah tersedia sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya, dilihat dari aspek sikap implementator seluruh komponen yang terlibat sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dilihat dari aspek struktur birokrasi sudah terbentuk mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.*

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah, Pemilihan Kepala Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Studi Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat kepada Bapak **Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Usman Tarigan, MS** selaku Pembimbing II yang sabar memberikan curahan ilmu yang tak ternilai harganya dengan tulus ikhlas, penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H.M. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. DR. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Warjio, MA. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Para Pegawai Administrasi pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Bapak Bupati Deli Serdang atas izin belajar yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Hendra Wijaya Camat Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
8. Adinda saya Sri Sari Dewi staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Pada kesempatan ini khususnya penulis menyampaikan rasa hormat yang tidak terhingga kepada Ibunda atas do'a dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana demikian juga buat suami tercinta Nelson, SH dan anak-anakku tersayang Melanie Claudia Simbolon, Putra Pratama Simbolon dan seluruh keluarga yang selalu berdo'a dan memberi dorongan dan semangat untuk keberhasilan penulis.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2013

Penulis

Norma Siagian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Penelitian.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	9
2.2. Implementasi Kebijakan	14
2.3. Kebijakan Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Desa	24
2.4. Perda Kab. Deli Serdang No. 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kades	29
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.2. Bentuk Penelitian	31
3.3. Populasi Penelitian	31
3.4. Sampel Penelitian.....	32

3.5. Teknik Pengumpulan Data.	33
3.6. Defenisi Konsep Operasional.	33
3.7. Teknis Analisis Data.	34
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Letak dan Keadaan Geografi.....	36
4.1.1. Luas Tanah dan Penggunaan Lahan	41
4.1.2. Strategi Pembangunan Daerah.....	42
4.1.3. Kondisi Lingkungan Internal Kabupaten Deli Serdang	42
4.1.4. Kondisi Eksternal yang mempengaruhi Kab. DS	45
4.1.5. Isu-isu Strategis Pembangunan Kab. DS.....	48
4.1.6. Rencana Tindak	50
4.1.7. Arah Kebijakan	54
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Namorambe	61
4.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Namorambe	61
4.2.2. Letak dan Geografis Kecamatan Namorambe.....	62
4.2.3. Keadaan Penduduk di Kecamatan Namorambe.....	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
5.1. Hasil Penelitian.....	82
5.1.1. Karakteristik Responden	82
5.1.2. Variabel Penelitian	84
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	116
6.2. Saran-Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Luas Wilayah Dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan	39
Tabel 4.2. Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan ke Lubuk Pakam.....	40
Tabel 4.3. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Deli Serdang.....	41
Tabel 4.4. Luas Desa, Jumlah Dusun dan Jarak Ibu Kota Kecamatan ke kantor Kepala Desa.....	63
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Penduduk Per Rumah tangga.....	65
Tabel 4.6. Klasifikasi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.7. Klasifikasi Penduduk Kecamatan Namorambe berdasarkan Kelompok Umur.....	68
Tabel 4.8. Klasifikasi Penduduk berdasarkan mata Pencaharian.....	71
Tabel 4.9. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Namorambe.....	73
Tabel 4.10. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Namorambe.....	75
Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kecamatan Namorambe.....	76
Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Produksi di Kecamatan Namorambe.....	78
Tabel 4.13. Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Namorambe.....	80
Tabel 5.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	82
Tabel 5.2. Distribusi Responden menurut Umur.....	83
Tabel 5.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan.....	83
Tabel 5.4. Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam Impelementasi Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007.....	84

Tabel 5.5.	Pendapat Responden ttg Pengetahuan Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 tahun 2007.....	89
Tabel 5.6.	Pendapat Responden tentang Pengetahuan Tujuan Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007.....	90
Tabel 5.7.	Pendapat Responden ttg Pengetahuan adanya Perangkat Aturan dalam Pemilihan Kebijakan Kepala Desa.....	91
Tabel 5.8.	Pendapat Responden ttg Pengetahuan adanya Peraturan tertulis dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007.....	95
Tabel 5.9.	Pendapat Responden ttg Pemahaman Peraturan dalam Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 tahun 2007.....	96
Tabel 5.10.	Pendapat Responden ttg Ketersediaan Sumber Daya manusia Mendukung kelancaran Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007.....	97
Tabel 5.11.	Pendapat Responden ttg Ketersediaan Sarana dalam Mendukung Kelancaran Kebijakan Perda No. 7 Tahun 2007.....	98
Tabel 5.12.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 dengan Peraturan Pelaksanaan.....	102
Tabel 5.13.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 Desa dengan Petunjuk Pelaksanaan.....	103
Tabel 5.14.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 dengan Petunjuk Operasional.....	103
Tabel 5.15.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 dengan Prosedur Kerja.....	107
Tabel 5.16.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 dengan Program Kerja.....	108
Tabel 5.17.	Pendapat Responden ttg Kesesuaian Kebijakan Perda Kab. DS No. 7 Tahun 2007 dengan Jadwal Kerja.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1. Kerangka Pikir Penelitian	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Langkah awal proses reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan diundangkannya 2 (dua) undang-undang yang sangat penting dan bersifat strategis tersebut adalah bagi pelaksanaan sistem pemerintahan. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelaksanaan Peraturan tersebut diatas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tema sentral yang muncul setelah diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 mengandung makna penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, huruf 3, UU No. 32 / 2004). Hal ini menunjukkan bahwa otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah otonom yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Istilah otonomi berarti penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta menjaga keserasian, hubungan antara Pemerintahan Pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (penjelasan Pasal 1, UU No. 32 / 2004).

Akibat langsung untuk menata asas desentralisasi ini adalah kesiapan pemerintahan daerah untuk menata keseluruhan perangkat organisasi dan manajemen serta kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal agar mampu melaksanakan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Fleksibilitas terhadap lingkungan ini merupakan prasyarat bagi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah untuk sukses dalam melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran maupun tepat guna.

Tujuan di atas harus dihadapi setiap pemerintahan daerah, terutama pemerintah kabupaten / kota yang merupakan ujung tombak pelaksanaan asas desentralisasi sebagai daerah otonom yang mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, maka kabupaten / kota tersebut akan tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan rakyat yang berdomisili di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin., 1997 *Analisis Kebijakan Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brinkerhoff, Derick W-- Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Edwards III George, 1980. *Implementing Public Policy, (Washington : Congressional Quarterly Press)*.
- Islami, Irfan, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta
- Israwan Setyoko, Paulus, 2002. *Good Governance di Indonesia; Sebuah Perjuangan*. Pidato Ilmiah Dies Natalis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Miles, Mattew B & Huberman A. Michael., 1992. *Analisis data Kualitatif*, Penerjemah Tjecep Rokendi Rohidi, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochlisin, 2004. *Implementasi Peraturan Daerah Plus*. (Studi Kasus Pencalonan dan Pengangkatan Sekdes di Desa Sokawera, Purbalinga). Tesis Tidak Diterbitkan, Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, UNSOED. Purwokerto.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Randal B, 1984. *Policy Analysis In Political Science*, The Dorsey Press Chicago, Illionis..
- Ripley, Randal B & Grace A Franklin, 1986. *Policy Implementation & Bureaucracy*, The Dorsey Press Chicago, Illionis..

- Sutopo, Heribertus, 1998. *Pengantar Penelitian Kuantitatif*, UNS, Surakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Med Press, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.